

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TERHADAP EFEKTIVITAS PENDAFTARAN PENDUDUK MUSIMAN DI KOTA BANDUNG

Achdiat

ABSTRAK

Fokus of interest dalam penelitian ini menggambarkan secara analitis fenomena kependudukan dan catatan sipil, melalui implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 26 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, dikaitkan dengan efektivitas pendaftaran penduduk musiman. Hasil obsevasi menunjukkan efektivitas pendaftaran penduduk musiman masih rendah, indikasinya terlihat dari produktivitas dan kemampuan menaksirkan pelaksanaan pendaftaran penduduk musiman. Studi ini, dilakukan di Dinas Kependudukan Kota Bandung pada Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil berpengaruh secara positif terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman. Hasil temuan penelitian menjelaskan adanya faktor lain yang tidak diukur tetapi turut mempengaruhi meliputi partisipasi masyarakat, perilaku penduduk musiman, dan motivasi pegawai.

Kata kunci : Implementasi kebijakan dan Efektivitas

I. Pendahuluan

Eksistensi Kota Bandung sebagai kota jasa dan perdagangan bahkan kota sejuta impian untuk meraih sukses memang sulit dipungkiri, maka wajarlah jika kota ini menjadi tujuan para pendatang untuk berjuang mengadu nasib di berbagai aspek kehidupan. Di sektor jasa pendidikan, dengan berbagai sekolah unggulan berstandar nasional maupun internasional, termasuk perguruan tinggi terkemuka baik PTN maupun PTS menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk menuntut ilmu di kota ini.

Berdasarkan survey sosial ekonomi (Suseda) tahun 2007 pertumbuhan penduduk Kota Bandung telah mencapai jumlah 2.329.928 jiwa yang menempati luas wilayah ± 16.729 ha. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar

1,88 persen pertahun, dengan rata-rata kepadatan penduduk sekitar 13.927,48 jiwa/Km² (BPS Kota Bandung 2008).

Jumlah penduduk sebesar itupun, telah menjadi daya tarik lainnya bagi para pendatang, sebagai peluang usaha dan pekerjaan baik yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan, sebut saja jasa pelayanan angkutan umum (angkot, Taxi, Travel, Bis antar kota dan daerah) juga jasa pelayanan pariwisata. Sementara itu, di bidang perdagangan berdirinya Mall, Departement Store, Super dan Mini Market, Toko, Grosir dan eceran, hingga PKL dan pedagang asongan makin hari tumbuh kian menjamur.

Konsekuensi logisnya, ialah mobilitas penduduk menuju Kota Bandung dengan berbagai kepentingannya menjadi lebih tinggi, sehingga laju pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali.

Dampak yang terjadi, lingkungan hidup perkotaan semakin tidak aman dan nyaman, macet dan semrawut, kumuh dan kotor. Oleh karena itu, dalam rangka tertib administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan Kota Bandung dituntut harus mampu menjadi lokomotif dalam melayani dan mengantisipasi pertumbuhan penduduk akibat pergerakan arus urbanisasi dan migrasi.

Sehubungan dengan sinyalemen di atas, maka peneliti tertarik dan memfokuskan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil (Perda Kota Bandung No. 26 Tahun 1998) terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman di Kota Bandung, sesuai kewenangan lembaga teknis daerah, maka penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan Kota Bandung.

Pentingnya pendaftaran penduduk musiman sebagai *focus of interest* dalam penelitian ini, karena akan memberikan peran dan kontribusi dalam menentukan arah perencanaan dan pengembangan pembangunan di Kota Bandung, oleh karenanya, efektivitas pendaftaran penduduk musiman di Kota Bandung perlu mendapatkan prioritas dalam agenda pemerintahan kota.

Hasil pengamatan awal peneliti pada Dinas Kependudukan Kota Bandung ternyata efektivitas pendaftaran penduduk musiman masih rendah, indikasinya : *Pertama*, produktivitas pendaftaran penduduk musiman, yang berdomisili di RW 06 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol kurang lebih 55 penduduk musiman berstatus mahasiswa-mahasiswi belum terdaftar atau memiliki kartu penduduk musiman (KIPEM) Kota Bandung. Padahal menurut Perda No. 26 semestinya dilakukan selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak kedatangannya di Kota Bandung.

Kedua, kemampuan menaksirkan masalah pelaksanaan pendaftaran penduduk musiman, yang belum terdata sebagai penduduk musiman di kota Bandung, padahal menurut aturan yang berlaku bahwa yang dimaksud penduduk musiman adalah mereka yang akan tinggal selama 3 minggu sampai dengan 5 tahun atau selama menyelesaikan studi atau urusan yang bersangkutan di Kota Bandung.

Faktor penyebab masih rendahnya efektivitas pendaftaran penduduk musiman tersebut diduga oleh implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil yang masih belum sepenuhnya didasarkan pada faktor-faktor kritis implementasi kebijakan, antara lain:

Pertama, masih kurangnya penyampaian (sosialisasi) informasi mengenai kebijakan kependudukan kepada pihak yang harus taat pada kebijakan. Hasil wawancara dengan target kebijakan menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui dan paham mengenai predikat/status penduduk musiman, serta perlu dan pentingnya kartu identitas penduduk musiman (KIPEM), walaupun mereka telah lebih dari 3 minggu tinggal di Kota Bandung.

Kedua, masih kurangnya kerjasama baik secara internal di antara aparaturnya pelaksana kebijakan maupun secara eksternal antara petugas dinas dengan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sehingga tidak mengetahui berapa jumlah penduduk musiman di daerahnya dan tidak pernah memberikan pengarahan kepada para pendatang tersebut. Seperti halnya yang terjadi di RW 06 Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol Kota Bandung.

Memandang pentingnya implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil dalam rangka mencapai efektivitas pendaftaran penduduk musiman, sehingga di Kota Bandung akan tercipta tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, ketertarikan peneliti untuk mengkaji permasalahan tersebut di atas secara lebih lanjut berkaitan, dituangkan dalam bentuk penelitian.

Rumusan masalah penelitiannya, diawali dengan pernyataan masalah (*problem questions*): Implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung belum optimal terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman. Selanjutnya, peneliti merumuskan pertanyaan masalah (*problem questions*) penelitian: seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman di Kota Bandung.

Maksud penelitian untuk menjelaskan secara analitis dan mengukur besarnya pengaruh implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman di Kota Bandung. Tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru mengenai besarnya pengaruh antara kedua variabel penelitian (X ke Y). Menemukan konsep baru berkaitan dengan teori implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil dihubungkan dengan efektivitas pendaftaran penduduk musiman di Kota Bandung.

II. Kerangka Pemikiran

Kajian pustaka diarahkan pada bagaimana relasi antara administrasi negara dengan kebijakan publik seperti

yang dinyatakan oleh *white* (Thoha, 2002 : 68) yaitu : "Public administration consist of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy". Adapun, konsepsi teoritik yang dijadikan anggapan dasar dalam merancang bangun model kerangka pikir penelitian, disesuaikan dengan masalah dan objek penelitian guna mempermudah menjawab pertanyaan masalah, oleh karena itu, peneliti mengemukakan pendapat Wahab (2001: 64) mengenai konsep implementasi kebijakan sebagai berikut :

"Implementasi Kebijakan adalah sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan-kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden)".

Selanjutnya, pandangan tentang implementasi kebijakan yang dijadikan parameter dalam penelitian ini dirujuk dari pendapat *Edwards III* (Tangkilisan, 2003 : 1) yang mengatakan :

"Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan".

Berkaitan dengan pendapat di atas, dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasikan kebijakan publik, seperti apa yang dikemukakan oleh *Edwards III* (Tangkilisan, 2003 : 19-148) terdiri dari :

"Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi atau Sikap Para Pelaksana; Struktur Birokrasi".

Kemudian, Tangkilisan (2003:9-148) menguraikan mengenai ke-empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti berikut: *Pertama*, bahwa faktor komunikasi penting menjadi perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, maka untuk itu, mereka yang tanggung jawabnya adalah untuk melaksanakan suatu keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan secara jelas, akurat dan konsisten.

Kedua, sumber daya diperlukan untuk mendukung personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan. Tidak menjadi soal betapa jelas, akurat dan konsisten komando yang ditransmisikan, tetapi jika personalia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kebijakan kurang sumber daya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif pula.

Ketiga, disposisi atau sikap para pelaksana implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif komando yang telah ditransmisikan, oleh karena itu, bukan saja, para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga, mereka mesti berkehendak untuk melaksanakan suatu kebijakan. *Ke-empat*, struktur birokrasi menjadi penting jika sumber daya telah cukup untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, dan para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, tetapi implementasi mungkin masih bisa terhambat karena kekurangan dalam struktur birokrasi.

Keterkaitan antara teori kebijakan publik dengan konsep efektivitas dalam

konteks penelitian ini, merujuk pada pandangan Mustopadidjaja (2002 : 9), dengan menyatakan : "Perhatian terhadap posisi, peran interaktif dan kondisi kelompok sasaran dalam proses kebijakan adalah penting, karena akan mempengaruhi ketepatan, efisiensi, efektivitas dan kinerja kebijakan". Pandangan ini, menjelaskan bahwa perhatian terhadap *target groups* dalam proses kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi, sangatlah penting, sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif dan tepat sasaran.

Selain pandangan di atas, Nugroho (2003 : 179) menguraikan pula dengan menyatakan :

"implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada "empat tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan, diantaranya: 1) Apakah kebijakan "sudah tepat". 2) "Tepat pelaksanaannya". 3) "Tepat target". 4) "Tepat lingkungan".

Pemikiran di atas, memberikan penjelasan : *Pertama*, apakah kebijakannya "sudah tepat", dinilai dari isi kebijakan bermuatan hal-hal yang dapat mengatasi masalah. Dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai dengan karakter kebijakan.

Kedua, "tepat pelaksanaannya". Ada tiga aktor yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama pemerintah dengan masyarakat / swasta menyangkut kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan monopoli pemerintah seperti pembuatan kartu penduduk, pertahanan keamanan. *Ketiga*, "Tepat Target", target diintervensi sesuai dengan rencana, tidak tumpang tindih dengan kebijakan lainnya,

targetnya siap untuk diintervensi (kondisi konflik/harmoni, mendukung/menolak).

Ke-empat, "tepat lingkungan". Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut sebagai *public opinion* yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. *Interprective institutions* berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan.

Berkeaan dengan teori di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan pandangan untuk memberi batasan mengenai konsep efektivitas yang mengacu pada pendapat Kussriyanto (1985: 3): "Efektivitas dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operasi". Pencapaian tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini, menyangkut tertib administrasi kependudukan dengan terdaftaranya penduduk musiman sebagai *target groups*.

Berdasarkan definisi efektivitas tersebut, maka untuk mengukurnya, peneliti menggunakan unsur-unsur efektivitas menurut pemikiran Kussriyanto (1985:20-21), sebagai berikut:

"1. Produktivitas, dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan; 2. Daya suai adalah kemampuan untuk menaksirkan masalah yang akan dihadapi dan persiapan diri untuk mengatasi masalah yang bersangkutan. 3. Keluwesan, menyangkut kemampuan anggota organisasi menanggapi keadaan darurat". Merujuk pada kerangka pikir penelitian di atas, maka selanjutnya

peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil berpengaruh terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung.
2. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung ditentukan oleh dimensi komunikasi, sumberdaya, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif, maksudnya ialah untuk menggambarkan secara analitis tentang situasi-situasi dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu pada objek penelitian, dan untuk menunjukkan hubungan antara kedua variabel, serta menguji hipotesis mengenai pengaruh implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung, berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan yang diukur secara kuantitatif (Nasution, 1987 : 41).

IV. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan teknik korelasi *Rank Spearman*, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil berpengaruh kuat terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada

Dinas Kependudukan Kota Bandung yaitu sebesar 56 %, sedangkan faktor lain yang tidak diukur tetapi turut mempengaruhi terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung, di luar faktor-faktor kritis implementasi kebijakan ialah sebesar 44 % meliputi motivasi pegawai, partisipasi masyarakat, dan perilaku masyarakat pendatang.

Dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian teruji, artinya semakin meningkat keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil, maka semakin meningkat pula efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung. Hasil penelitian ini memperkuat konsepsi teoritik mengenai hubungan antara implementasi kebijakan dengan efektivitas.

Hasil analisis pengaruh implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung, berdasarkan faktor-faktor kritis implementasi kebijakan, diuraikan di bawah ini:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penyebaran angket, peneliti menganalisis bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil masih kurang berpengaruh secara positif terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung. Indikasinya, komunikasi diantara para pelaksana kebijakan kurang terjalin sehingga agenda kerja atau program kegiatan lapangan sangat jarang, termasuk membangun komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan *target groups* (pemilik rumah kontrak/kost, penduduk musiman).

Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan belum dilakukan secara intensif terhadap perangkat wilayah kecamatan termasuk kelurahan, RW dan RT, dan koordinasi Dinas Kependudukan dengan pihak kecamatan masih jarang dilaksanakan, sehingga tidak didapatkan data yang kongrit untuk *database* kependudukan, termasuk prosedur dan biaya pembuatan identitas diri penduduk musiman (KIPEM)

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket, peneliti menganalisis bahwa faktor sumberdaya dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil berpengaruh cukup positif terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung. Walaupun, realita yang ada saat ini sumberdaya pada Dinas Kependudukan kurang mencukupi, misalnya jumlah pegawai termasuk unsur pimpinan hanya berjumlah 27 orang, hal ini tidak sebanding dengan luas garapan yang terdiri dari 33 kecamatan, dengan luas wilayah 16.729 ha dan jumlah penduduk ± 2.329.928 jiwa. Namun demikian, sebagian tugas dinas dibantu aparatur kecamatan, oleh karena itu, bantuan aparatur Kecamatan yang bertugas sebagai operator pendaftaran dan pendataan kependudukan bagi dinas, harus lebih diperluas lagi tugas dan kewenangannya karena aparatur kecamatan dan perangkat kebawahnya bisa lebih dekat untuk menjangkau daerah kantung-kantung penduduk musiman.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket, peneliti menganalisis bahwa faktor sikap para pelaksana kebijakan yang ada pada Dinas Kependudukan Kota Bandung cukup

berpengaruh terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman. Dimana para pelaksana kebijakan sangat mendukung dan peduli terhadap peraturan daerah kota yang berkaitan dengan kependudukan. Hal ini, menunjukkan adanya kesadaran yang baik dari para pelaksana untuk terus dibina dan dikembangkan. Namun demikian, kerjasama masih kurang dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil, baik kerjasama di antara pelaksana dalam lingkungan Dinas Kependudukan sendiri maupun dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, RW serta RT setempat.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket peneliti menganalisis bahwa faktor struktur birokrasi pada Dinas Kependudukan Kota Bandung dalam pengimplementasian kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil belum cukup berpengaruh terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman. Dimana prosedur dan fragmentasi organisasi yang ada belum berjalan sesuai peraturan yang berlaku (Perda Kota Bandung No. 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil). Di samping itu, masyarakat masih banyak yang tidak paham dengan mekanisme dan prosedur birokrasi, untuk melakukan pendaftaran sebagai penduduk musiman, sehingga banyak penduduk musiman yang menunda pendaftaran penduduk musiman, hal ini, merupakan bentuk kesadaran dari warga untuk taat hukum, tentunya perlu upaya dari pihak dinas untuk lebih dapat memberi pelayanan yang baik.

Selanjutnya, faktor lain yang tidak diukur tetapi turut berpengaruh terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musi-

man di Kota Bandung adalah : *Pertama*, partisipasi masyarakat setempat (khususnya pemilik rumah kontrakan/kost), dimana para pemilik rumah tersebut belum memiliki kesadaran untuk bekerjasama dengan pemerintah terdekat, berkaitan dengan kesediaan untuk memberikan informasi data diri mengenai penyewa.

Kedua, perilaku penduduk musiman yang kurang mendukung (sikap acuh tak acuh) atau belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran penduduk musiman (KIPPEM), padahal ini penting untuk kepentingan mendapatkan layanan pemerintah dan perlindungan keamanan di daerah tempat tinggal sementara. *Ketiga*, faktor motivasi aparaturnya pelaksana kebijakan dari dinas masih kurang dalam upaya pelaksanaan pendaftaran penduduk musiman, menyangkut minimnya dana operasional lapangan, untuk pendataan penduduk musiman di tingkat RT/ RW.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian: *Pertama*, implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil berpengaruh secara moderat terhadap efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung. Artinya semakin meningkat upaya implementasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil, semakin meningkat juga efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung.

Kedua, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendaftaran penduduk musiman pada Dinas Kependudukan Kota Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh factor-faktor kritis implementasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil,

tetapi juga dipengaruhi juga oleh factor lain (ε) seperti partisipasi masyarakat setempat, perilaku penduduk musiman, dan motivasi aratur dinas.

Saran akademis: Perlu penelitian lanjutan dalam konteks kajian dan topic yang sama tetapi dengan perspektif yang berbeda, melalui pendekatan interdisipliner (hukum, sosiologi, pemerintahan). Saran praktis : Pertama, perlu koordinasi yang intensif dan kontinuitas antara Dinas Kependudukan dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan, khususnya pendaftaran penduduk musiman, dengan melibatkan aparat hingga ke bawah RT/RW, untuk mendorong partisipasi masyarakat pemilik rumah kontrakan/kost),

Kedua, merubah sikap dan perilaku penduduk musiman agar memiliki kesadaran terhadap tata tertib dan aturan yang berlaku di daerah di mana mereka tinggal, dengan semboyan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, melalui sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kependudukan. *Ketiga*, memberikan motivasi kepada aparatur dinas baik melalui insentif berbentuk uang operasional lapangan dan melalui pembentukan karakter dan kesadaran (disiplin) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bukan sebaliknya negara nu abdi dan masyarakat setor ka abdi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, George dalam Hessel N.S Tangkilisan.2003.*Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Lukman Offset.
- Kussriyanto, Bambang.1985. *Ikhtisar Studi Organisasi*.Jakarta:Antar Kota.
- Mazmanian, A.Daniel dan Paul A.S dalam Solichin A. Wahab. 2001.*Analisis*

Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta:Bumi Aksara.

- Muhadjir.2003,*Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Mustopadidjaja, AR. 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- Nirwana S K Sitepu, 1995, *Analisis Korelasi, Unit Pelayanan Statistika Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, Bandung.
- Putra, Fadillah. 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 1992, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S .2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta, Lukman Offset & YPAPI.
- Thoha, Miftah. 2002, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab,Abdul Solichin.2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Himpunan Lembaran Daerah Kota Bandung Pemerintahan Kota Bandung Bagian Hukum Tahun 2001.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Dati II Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Kependudukan di Kotamadya Dati II Bandung.